

## BAB 4

### DISKUSI TEORI

#### 4.1. Implikasi Teori:

##### 4.1.1. Status Dalam Struktur Sosial Masyarakat

Dalam proses hubungan sosial secara umum status sosial merupakan sesuatu yang sangat penting, tergantung pada dimensi apa masyarakat itu meletakkan ukuran status sosialnya. Secara sosiologis status sosial merupakan satu bentuk pengelompokan orang-orang ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan dimensi budaya, ekonomi dan dimensi politik (Weber 1947). Ada temuan yang sebelumnya sudah pernah diteliti di Tanimbar tentang masalah status sosial tersebut. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dimensi budaya adalah yang paling dominant dalam penentuan status sosial jika dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya. Karena itu dalam temuan (Renwarin 1987 dan Drabbe, 1989) menunjukkan bahwa: dimensi budaya menjadi paling dominant dalam menentukan status sosial di Tanimbar. Dan dari hasil temuan mereka berdua ada 2 macam status di Tanimbar yaitu: sebagai duan atau pemberi anak dara dan lolat sebagai penerima anak dara. Sedangkan (Mc Kinnon 1991) menemukan bahwa: status di Tanimbar dijelaskan dalam 3 bentuk yaitu: Mela ulu (depan) mela fruan (tengah) dan mela Muri (belakang). Status sosial di Tanimbar dalam temuan sebelumnya ini menjadi sangat penting sebab sangat menentukan hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat tersebut.

Sedang dalam temuan penelitian tersebut penulis bagi dalam 2 periodisasi waktu:

1. Tahun 1995-1999: ditemukan bahwa sebenarnya status sosial di Olilit MTB itu dibagi atas 3 bagian yakni: ompakain, udanain dan empuanin. Ketiga macam status ini didasarkan pada dimensi budaya yang ditentukan berdasarkan jalur perkawinan. Dan dalam kurun waktu 1995-1999, ketiga macam status ini berjalan seperti pada keadaan sebelumnya. Dimana hubungan sosial duan dan lolat didasarkan pada status tersebut.
2. Dalam kurun waktu 2000-2004: Masa ini ditandai dengan adanya stimulus eksternal yang baru yang pada masa sebelumnya jarang ditemukan. Pengaruh

tersebut berasal dari berbagai faktor diantaranya dari faktor ekonomi dan faktor birokrasi politik yang ada di Olilit-Saumlaki MTB. Dimana masyarakat secara langsung dapat mengakses pengaruh yang ada tanpa mendapatkan hambatan seperti pada masa sebelumnya. Proses perubahan mulai terjadi dalam hubungan sosial duan dan lolat, karena dasar penentuan status sosial tidak lagi didasarkan pada dimensi budaya semata-mata. Ukuran-ukuran status sosial yang sudah ada sebelumnya hanya berdasarkan ukuran budaya mulai bergeser pada dimensi ekonomi dan birokrasi politik. Hal ini membuat hubungan sosial duan dan lolat mulai berubah karena prestise dan previles adat mulai tersaingi dan tergantikan menurut ukuran-ukuran ekonomi dan birokrasi politik.

Kondisi ini menjadi relevan dengan teorinya Weber tentang tindakan sosial dan struktur sosial, dimana pada tahun 1995-1999 seluruh pandangan, cara berpikir maupun tindakan sosial yang dilakukan sehubungan dengan status ini didasarkan pada rasionalitas tradisional berdasarkan legitimasi otoritas tradisional. Sedang dalam kurun waktu 2000-2004, keberadaan kabupaten di Olilit Saumlaki MTB dengan faktor birorasi, ekonomi dan politik membuat ada perubahan dalam cara masyarakat menilai maupun hidup didalam dinamika status tersebut. Ukuran-ukuran status menurut budaya kemudian bergeser pada ukuran-ukuran berdasarkan pada ekonomi, politik maupun birokrasi. Hubungan sosial duan dan lolat dalam kurun waktu tersebut (2000-2004) kemudian mengalami perubahan di Olilit.

#### **4.1.2. Peranan Dan Fungsi dalam hubungan sosial duan dan lolat.**

Peranan atau *role* secara sosiologis merupakan aspek dinamis dari status. Weber (1947) menekankan pentingnya: pentingnya otoritas sebagai sumber legitimasi dari tindakan sosial sebagai konsekwensi dari upaya menjalankan peran tersebut. Dan tindakan sosial itu mempunyai tipe-tipe yang berbeda-beda sesuai otoritas sebagai sebagai sumber legitimasi atas tindkan sosial tersebut.. Legitimasi tersebut berupa kepercayaan akan kemampuan untuk melaksanakan peran tersebut akibat status sosial yang dimiliki. (Renwarin 1987, Drabbe 1989 dan Mc Kinnon 1991): menemukan bahwa di Tanimbar

terdapat 3 bentuk peranan yakni: Peran untuk memilih/menentukan jodoh, peran untuk membayar harta adat, dan peran sebagai pelindung dalam system Arin maupun pembuatan tais pengikat.

Dalam temuan penulis ada perbedaan dalam ketiga peranan ini dalam kurun waktu penelitian ini:

1. Dalam kurun waktu 1995-1999: ada pergeseran dalam peran sebagai penentu jodoh bagi lolat oleh duan ompakain ke duan udanain. Peran sebagai pembayar harta adat tetap dan tidak berubah. Peran dan fungsi sebagai pelindung yakni dalam system arin dimana duan berperan menyediakan lahan sebagai ladang bagi lolatnya, dan sebaliknya lolat saat itu juga melayani duannya dengan sebaik-baiknya. Dengan makanan dan minuman terbaik yang ada padanya saat itu juga. Hal tetap berjalan walaupun mulai terhambat oleh adanya himbauan pemerintah untuk menghentikan system perladangan berpindah. Sedang peran sebagai pembuat tais pengikat duan ke lolat dalam kurun waktu tersebut sudah mengalami perubahan dalam hal tujuan dan makna pembuatannya. Ditemukan bahwa dalam kurun waktu tersebut tais sudah dijual secara bebas walaupun belum seperti yang terlihat sekarang ini.
2. Sedang dalam kurun waktu: 2000-2004: Terjadi perubahan dalam pelaksanaan peranan tersebut. Peranan penentuan Jodoh yang tadinya menjadi urusan Duan *Ompakain*, peran membayar harta yang menjadi urusan *ompakain (lele)*, *udanain (lelbutir)* dan *Empuain (masa)* mengalami perubahan. Legitimasi tradisi adat duan lolat yang mengatur hal tersebut kemudian mengalami perubahan dan diambil alih oleh masing-masing orang yang mempunyai urusan tersebut. Bila seseorang menikah maka dia dan keluarganya sendiri yang membayar hartanya. Pada tingkat inilah perubahan itu menyentuh menunjukkan adanya sebuah perubahan dalam tindakan sosial yang sbelumnya sering memberlakukan tindakan tradisonal dengan otoritas tradisonal sebagai sumber legitimasinya bergeser pada tindakan rasionalitas instrumental yang dilegitimasi oleh otoritas legal formal dalam organisasi birokrasi. Karena bentuk harta adat berupa lele, lel butir maupun masa kemudian

dikalkulasi dalam sejumlah rupiah. Sehingga dalam kondisi dimana status adat juga mengalami pergeseran maka duan yang tadinya berkewajiban membayar harta mempunyai alasan untuk menolak kewajiban tersebut lantaran terdapat semacam pemangkasan atas hak-hak adatnya. Ukuran harta adat yang biasanya dibayarkan dalam sebuah motivasi tindakan yang afektif berdasarkan perasaan kini bergeser pada pada ukuran-ukuran yang jauh lebih rasional berdasarkan perhitungan untung dan rugi.

Demikian juga perubahan terjadi dalam fungsi sebagai pembuat tais pengikat hubungan duan dan lolat. Jika pada masa sebelumnya, yang harus membuat tais ialah duan dan memberikannya kepada lolat, maka dalam kurun waktu tersebut baik duan maupun lolat dapat saja membuat sesukanya tetapi tidak lagi digunakan untuk kepentingan adat tetapi untuk dijual. Pola organisasi secara adat yang mengkoordinir pembuatan tais untuk kepentingan adat sudah berubah menjadi satu mata rantai jual beli yang dilakukan secara bebas. Ini menjadi satu temuan yang menunjukkan bahwa: sebenarnya hubungan sosial duan lolat yang sebelumnya berjalan sesuai otoritas tradisional berubah didalam tindakan sosial rasionalitas instrumental melalui legitimasi otoritas legal formal.

#### **4.1.3. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perubahan hubungan sosial duan dan lolat.**

Bahasan tentang faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi jalannya perubahan hubungan sosial, bisa berbeda tergantung dari mana kita memandangnya dan ke mana penelitian itu diarahkan. Weber (1947, 1956) mengemukakan 4 faktor utama dalam perubahan hubungan sosial yakni: Faktor Ekonomi maupun faktor politik serta faktor agama, serta faktor birokrasi menjadi sebuah faktor yang paling rasional dalam menjelaskan tentang perubahan hubungan sosial sosial. Sedang temuan sebelumnya tentang Tanimbar melalui (Renwarin, 1987, Drabbe, 1989 dan Mc Kinnon, 1991) menemukan ada 3 faktor utama yang

menyebabkan perubahan hubungan sosial duan lolat di Tanimbar yakni: faktor perang atau konflik antar kampung, faktor pengaruh birokrasi formal melalui kota Kabupaten di Tual kepulauan Kei dan kota kecamatan di Saumlaki, serta faktor agama. Dari ketiga faktor tersebut terutama Drabbe dan Renwarin memberi penekanan yang berbeda terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perubahan hubungan sosial duan dan lolat. Dimana Renwarin memberikan penekanan terhadap faktor birokrasi dengan penentuan kota kabupaten di Tual pada tahun 1953/1954, yang menyebabkan terjadi konflik antar kampung karena persoalan batas tanah. Sedang Drabbe menemukan bahwa perang dan konflik dengan alasan apapun adalah bagian dari kebiasaan orang Tanimbar sejak dulu. Itulah sebabnya kedatangan Portugis dan Belanda di Tanimbar makin manambah konflik antar kampung karena berbagai alasan. Sedang faktor agama dalam temuan mereka merupakan faktor yang menyatu dengan adat duan lolat sehingga tidak banyak berpengaruh dalam perubahan hubungan sosial duan dan lolat.

Sedang penelitian ini menemukan bahwa: bahwa ada kurang lebih terdapat 5 faktor utama yang berpengaruh terhadap perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit. Namun demikian pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perubahan hubungan duan dan lolat dalam kurun waktu tersebut berbeda satu dengan yang lainnya:

1. Dalam kurun waktu 1995-1999: Terdapat 3 faktor utama yakni: *konflik atau perang* yang terjadi. Dalam kurun waktu tersebut sekalipun sering terjadi konflik antar kampung mengenai masalah batas tanah, hasil pertandingan sepak bola dan sebagainya, tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap hubungan sosial duan dan lolat di Olilit karena, jenis konflik itu merupakan konflik eksternal sehingga, ada keuntungannya bagi penguatan solidaritas internal di dalam kampung Olilit sendiri. Sedang masalah birokrasi juga tidak banyak berpengaruh dalam kurun waktu tersebut. Sebaliknya faktor yang sangat berpengaruh adalah: Faktor agama melalui satu keputusan untuk melarang system kawin darah yang menjadi hakekat hubungan

sosial duan dan lolat. Hal ini berpengaruh pada peran-peran adat yang dijalankan masing-masing pihak, sebagaimana dijelaskan di atas. Jadi dalam kurun waktu tersebut, hanya terdapat 3 faktor saja yang berpengaruh terhadap perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit

2. Sedang dalam kurun waktu 2000-2004: Faktor yang sangat kuat berpengaruh ialah: *Faktor Birokrasi* yang secara mendasar mengubah hubungan sosial duan dan lolat, termasuk beberapa kebijakan yang diambil misalnya tentang penerimaan CPNS menjadi sebab renggangnya hubungan sosial duan dan lolat. Faktor *partai politik dan praktek politik* sejak tahun 2000, membuat banyak perubahan terjadi tidak hanya dalam hubungan sosial, tetapi dalam cara berpikirkpun mengalami perubahan. *Faktor Teknologi* baik informasi, transportasi maupun komunikasi, serta faktor agama dan *faktor konflik internal* di dalam Olilit banyak membawah perubahan dalam hubungan sosial duan dan lolat.

Pengaruh faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa: praktek hubungan sosial duan dan lolat diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan bebas dan lebih memudahkan. Pilihan terhadap apakah seorang anak smu harus mendengarkan nasehat omnya untuk tinggal dan tetap belajar di rumah sejak pulang sekolah, atau dia harus mengambil keputusan untuk pergi ke internet dan mengakses berbagai informasi termasuk main game. Dalam kenyataannya hal yang kedua yang biasanya menjadi pertimabangan sang anak untuk melakukan tindakan sosialnya. Ini berarti praktek hubungan sosial duan dan lolat (antara om dan ponaan) tidak lagi dilakukan berdasarkan otoritas tradisional yang dilegitimasi oleh otoritas tradisional, tetapi perubahan yang terjadi justru dalam tindakan sosial sang ponaan yang ketika memutuskan untuk pergi warnet menunjukkan sebuah penurunan nilai penghargaan berdasarkan rasionalitas tradisional, tetapi disisi lain hal itu menunjukkan adanya pola rasionalitas tindakan yang semakin berubah dari bentuk

tradisional ke pilihan akan nilai dan alat untuk mencapai tujuan. Sebab akan sangat berbeda akibatnya jika saja ada internet di rumah sehingga si ponaan tidak akan ke mana mana.

Tabel. 1.4. Perbandingan Teori Dan Temuan Lapangan

No	Weber	Drabbe, Renwarin dan Mc Kinnon	Koritelu
1	Status Sosial Berdasarkan dimensi Budaya, Ekonomi dan Politik	Status Sosial di Tanimbar a). Duan dan Lolat b). Mela Ulu, Mela Fruan, Dan Mela Muri	Status Sosial di Olilit: 1. Ompakain 2. Udanain 3. Empuain
2	Rasionalitas merupakan dasar untuk menentukan tipe-tipe tindakan sosial: <b>Non Rasional:</b> 1. Tindakan Tradisional 2. Tindakan Afektif <b>Tindakan rasional:</b> 1. Rasionalitas Instrumental 2. Rasionalitas yang berorientasi nilai	Faktor yang berpengaruh dalam Perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Tanimbar: 1. Faktor Perang dan konflik 2. Faktor Birokrasi melalui kota kabupaten di Tual tahun 1953/1954 3. Faktor Agama	Faktor yang berpengaruh dalam perubahan hubungan sosial duan dan lolat: 1. Konflik Internal di Olilit. 2. Kehadiran Pemekaran Kab MTB tahun 2000. 3. Faktor Agama 4. Faktor Politik (partai Politik dan praktek politik) 5. Faktor teknologi.
3			Perubahan hubungan sosial duan dan lolat berbeda dalam 2 kurun waktu yang diteliti (pengaruh setiap faktor dalam 2 kurun waktu juga berbeda)

#### 4.2. Implikasi Kebijakan:

##### Dari Tradisional Adat “Duan dan Lolat” ke Rasionalitas Birokrasi Modern.

Perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit dalam kurun waktu 1995-2004 menunjukkan betapa aspek-aspek tradisional yang dikemas melalui hubungan sosial duan dan lolat, masih memerlukan pembenahan-pembenahan yang serius dari berbagai pihak.

Tercatat ketika diberlakukan UU No.5 tahun 1979 tentang sistim pemerintahan, tidak cukup membawa pengaruh dalam mengubah cara berpikir orang olilit dalam berbagai tindakan sosialnya. Jauh sebelum itu, yakni sekitar pertengahan tahun 1950-an dengan ditetapkannya Tual sebagai

kota kabupaten dan Saumlaki sebagai kota kecamatan, ternyata tidak cukup kuat membawa perubahan-perubahan ke arah keinginan-keinginan baik dalam cara berpikir maupun dampak pembangunan fisik yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Bahkan sampai pada awal tahun 1994 dengan dilakukan program IDT yang langsung dikoordinir dari pusat, ternyata tidak banyak membawa perubahan yang berarti progress dalam kehidupan orang Olilit.

Atas dasar itu sejak diberlakukannya program otonomi daerah, maka secara serius pemerintah daerah Maluku bermaksud membenahi setiap pelosok wilayahnya dari ketertinggalan di berbagai bidang saat ini. Oleh karena itu sejak akhir tahun 1999, isu pemekaran beberapa daerah tingkat II di Maluku yang sedang mengalami konflik, semakin santer terdengar. Dengan dasar UU No.46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi Maluku Utara, kabupaten pulau Buru dan kabupaten MTB. Pemekaran kabupaten MTB disempurnakan lagi oleh UU No.6 tahun 2000, yang kemudian dilanjutkan dengan pemekaran kecamatan khususnya di wilayah Tanimbar. Dari 2 kecamatan menjadi 9 kecamatan. 7 kecamatan tambahan tersebut dimekarkan berdasarkan Perda No.01 tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan Yaru, Nirunmas dan kecamatan Kormomolin serta berdasarkan Perda no. 3 tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan Selaru, Wertamrian, Wermaktian dan kecamatan Wuarlabobar.

Persoalannya hanya satu yakni: bagaimana merajut berbagai kebiasaan adat tradisional seperti duan dan lolat ke dalam satu perpaduan yang seimbang dengan rasionalitas moderen? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum bisa terjawab hingga saat ini. Kendala terletak pada masalah kualitas SDM yang tidak mampu membuat terobosan untuk mengembangkan diri pribadinya.

Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemda MTB secara praktis, langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat "Olilit" ternyata tidak cukup kuat mengubah pola dan cara berpikir yang masih bertaut pada model tradisi masa lalu yang hingga kini masih dipertahankan di dalam kehidupan yang kian menuntut arah berpikir dan cara hidup yang rasional. Berbagai



kebijakan yang dilakukan Pemda MTB tetap terasa kurang bagi mereka “Olilit”, bahkan yang paling sering muncul adalah: pemaksaan memberlakukan cara-cara tradisional di tengah mekanisme birokrasi yang rasional dan moderen. Satu persoalan kunci adalah bagaimana merajut Rasionalitas Birokrasi moderen agar menjadi representative dalam mengubah cara berpikir masyarakat Olilit yang saat ini tanpa disadari mulai membuka diri terhadap perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, yakni dengan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada kekompakan internal (renggangnya) hubungan duan dan lolat perlu dimanfaatkan dengan baik untuk semua pihak yang berkepentingan untuk memasukkan ide dan kebijakan-kebijakan yang lebih progresif.

